

PERAN GANDA PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER

*Dwi Edi Wibowo**

Abstract : *Woman partisipation consists of tradidition and trasition roles. The tradition or domestic role includes women as a wife, mother and household manager. Meanwhile the transition or public role covers woman as a labor, member of society and development as a whole. Nowadays, the phenomenon in the society is woman tends to work harder to eran money for the family and to express themselves. One indicator of woman role in national deveploment can be seen from an increase in variety of woman job, it does not mean that the woman welfare increase automatically. The woman face dicrimination, not pnly in domestic sector but also in public sector. Therefore, the dynamic charateristic of woman multifunction is important to be learned*

Kata Kunci : Perempuan, Peran ganda, Domestik- public, Kesetaraan Gender

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan saat ini, bukan sekedar menuntut persamaan hak tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat Indonesia. Melihat potensi perempuan sebagai sumber daya manusia maka upaya menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukan hanya merupakan perikemanusiaan belaka, tetapi merupakan tindakan efisien karena tanpa mengikut sertakan perempuan dalam proses pembangunan berarti pemborosan dan memberi pengaruh negatif terhadap lajunya pertumbuhan ekonomi (Pudjiwati, 1983). Partisipasi perempuan menyangkut peran tradisi dan transisi. Peran tradisi atau domestik mencakup peran perempuan sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga. Sementara peran transisi meliputi pengertian perempuan sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan manusia pembangunan. Pada peran transisi wanita sebagai tenaga kerja turut aktif dalam kegiatan ekonomis (mencari nafkah) di berbagai kegiatan sesuai dengan ketrampilan dan pendidikan yang dimiliki serta lapangan pekerjaan yang tersedia (Sukesi, 1991).

Keterlibatan perempuan yang sudah kentara tetapi secara jelas belum diakui di Indonesia membawa dampak terhadap peranan perempuan dalam kehidupan keluarga. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat adalah semakin banyaknya perempuan membantu suami mencari tambahan penghasilan, selain karena didorong oleh kebutuhan ekonomi keluarga, juga perempuan semakin dapat mengekspresikan dirinya di tengah keluarga dan masyarakat. Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan perempuan untuk berpartisipasi di pasar kerja, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Nampaknya sebagian besar masyarakat Indonesia sepakat bahwa peranan perempuan tidak bisa dipisahkan dengan peran dan kedudukan mereka dalam keluarga. Mengingat di masa lalu, perempuan lebih banyak terkungkung dalam peran sebagai pendamping suami dan pengasuh anak. Namun seiring dengan kemajuan ekonomi dan meningkatnya pendidikan wanita maka banyak ibu rumah tangga dewasa ini yang tidak hanya berfungsi sebagai manajer rumah tangga, tetapi juga ikut berkarya di luar rumah.

*. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, Lulusan S2 Universitas Admajaya Yogyakarta

Pembagian kerja laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada aktivitas fisik yang dilakukan, di mana perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab atas pekerjaan nafkah. Pekerjaan rumah tangga tidak dinilai sebagai pekerjaan karena alasan ekonomi semata dan akibatnya pelakunya tidak dinilai bekerja. Permasalahan yang muncul kemudian adalah pekerjaan rumah tangga sebagai bagian dari pekerjaan non produksi tidak menghasilkan uang, sedangkan pekerjaan produksi (publik) berhubungan dengan uang. Uang berarti kekuasaan, berarti akses yang besar ke sumber-sumber produksi, berarti status yang tinggi dalam masyarakat. Dalam perkembangan budaya, konsep tersebut di atas berakar kuat dalam adat istiadat yang kadang kala membelenggu perkembangan seseorang. Pantang keluar rumah, seorang anak perempuan harus mengalah untuk tidak melanjutkan sekolah, harus menerima upah yang lebih rendah, harus bekerja keras sambil menggendong anak, hanya karena dia perempuan (Keppi Sukesi, 1991). Ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan akan memunculkan persepsi bahwa perempuan dilahirkan untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih terbatas jumlahnya dengan status pekerjaan rendah pula. Di negara berkembang, tingkat pendidikan yang sangat rendah dengan ketrampilan rendah pula, memaksa perempuan memasuki sektor informal yang sangat eksploitatif dengan gaji sangat rendah, jam kerja yang tak menentukan panjang, tidak ada cuti dengan bayaran penuh serta keuntungan –keuntungan lainnya (Syamsiah Achmad, 1995).

PEMBAHASAN

A. Peran Ganda Perempuan

Kemajuan ekonomi dan globalisasi membuat pasar kerja semakin kompleks. Dampak lain dari kemajuan tersebut, terlihat dari makin membaiknya status serta lowongan kerja bagi wanita. Walaupun angka partisipasi angkatan kerja wanita meningkat, namun tidak sedikit wanita yang bekerja penggal waktu atau bekerja di sektor informal. Hal ini berkaitan dengan peran ganda wanita sebagai ibu yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga termasuk membesarkan anak, serta sebagai pekerja perempuan (Dwiantini, 1995). Partisipasi wanita saat bukan sekedar menuntut persamaan hak, tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat Indonesia. Partisipasi wanita menyangkut peran tradisi dan peran transisi, peran tradisi atau domestik mencakup peran wanita sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga.

Sementara peran transisi meliputi pengertian wanita sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan manusia pembangunan. (C. Sukesi, 1991). Kecenderungan wanita untuk bekerja menimbulkan banyak implikasi antara lain melonggarnya ikatan keluarga, meningkatnya kenakalan remaja. Menurut Syamsiah Achmad (dalam Ichoromi, 1995) bahwa jumlah wanita pencari kerja akan semakin meningkat di sebagian wilayah dunia. ketidakadilan yang menimpa kaum wanita akan memunculkan persepsi bahwa wanita dilahirkan untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih terbatas jumlahnya dengan status pekerjaan lebih rendah dengan imbalan yang rendah pula. Pekerjaan wanita selama ini umumnya terbatas pada sektor rumah tangga (sektor domestik), walaupun kini wanita mulai menyentuh pekerjaan di sektor publik, jenis pekerjaan inipun merupakan perpanjangan dari pekerjaan lainnya yang lebih banyak memerlukan keahlian manual. Di negara berkembang, tingkat pendidikan yang sangat rendah dengan ketrampilan rendah pula, memaksa wanita memasuki sektor informal yang sangat eksploitatif dengan gaji sangat rendah, jam kerja yang tidak menentu dan panjang, tidak ada cuti dengan bayaran penuh.

Memperhatikan peranan wanita dalam pembangunan, sejak sensus 1971 sudah mulai dirasakan kesenjangan partisipasi dalam pembangunan antara pria dan wanita. Kaum wanita mengalami diskriminasi tidak saja di sektor domestik, sektor publik kaum wanita mengalami hal yang sama. Sistem ekonomi industri yang kapitalik yang mengutamakan pertumbuhan dan konsumsi justru menimbulkan diskriminasi terhadap wanita. Diskriminasi di bidang ekonomi dapat dilihat dari kesenjangan upah yang diterima wanita dibanding pria. Kesenjangan ini bisa dilihat pada setiap kategori seperti tingkat pendidikan, jam kerja, dan lapangan usaha. Semakin rendah tingkat pendidikan wanita, semakin besar kesenjangan upah yang diterima terhadap pria.

Rendahnya tingkat pendidikan wanita ini akan berdampak pada kedudukan mereka dalam pekerjaan dan upah yang mereka terima (Siti Hidayati dalam Ihromi, 1995). Hal serupa juga terjadi pada jenis usaha, artinya wanita yang melakukan usaha ekonomi yang sama dengan pria mendapatkan penghasilan yang lebih rendah. Keteringgalan wanita pada peran transisi mereka adalah apabila ditelusuri lebih lanjut kelihatannya berpangkal pada pembagian pekerjaan secara seksual di dalam masyarakat di mana peran wanita yang utama adalah lingkungan rumah tangga dan peran pria yang utama di luar rumah sebagai pencari nafkah utama. Pembagian kerja secara seksual ini jelas tidak adil bagi wanita, sebab pembagian kerja seperti ini selain mengurung wanita juga menempatkan wanita pada kedudukan subordinat terhadap pria, sehingga cita-cita untuk mewujudkan wanita sebagai mitra sejajar pria, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat mungkin akan sulit terlaksana.

Hambatan yang dihadapi wanita dalam dunia kerja yaitu :

1. Hambatan bersifat eksternal antara lain masalah tata nilai sosial – kultural yang memang belum memiliki kesadaran gender yang memadai.
2. Hambatan bersifat internal yang datang dari kaum perempuan sendiri antara lain kesiapan, kesediaan, kemauan, dan konsistensi dalam perjuangan sehingga dapat diakui dan dihargai pihak lain. Pemberian peluang dengan kelonggaran tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang ke depan. Perempuan harus mempersiapkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki apakah akan berkarir di profesional, politik
3. Hambatan dari sistem pemerintah antara lain dari peraturan-pertaturan perundang-undangan.

B. Dari Domestik Ke Publik : Implikasi Sosial Migrasi Tenaga Kerja Perempuan

Di era industrialisasi sekarang ini, di mana sektor industri menjadi motor pembangunan sangat diperlukan adanya tenaga kerja yang merupakan salah satu input dalam proses produksi. Sumbangan wanita dalam pembangunan ekonomi terlihat dari kecenderungan partisipasi wanita dalam angkatan kerja. Sebagai salah satu indikator partisipasi dalam bidang ekonomi ditunjukkan dari laju peningkatan partisipasi wanita dalam angkatan kerja lebih cepat dari peningkatan laju partisipasi pria. Keterlibatan perempuan dalam bidang pekerjaan sering tidak diperhitungkan, besarnya upah yang diterima perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Dengan tingkat pendidikan yang sama, pekerja perempuan hanya menerima sekitar 50% sampai 80% upah yang diterima laki-laki. Selain itu banyak perempuan yang bekerja pada pekerjaan marginal sebagai buruh lepas, atau pekerja keluarga tanpa memperoleh upah atau dengan upah yang rendah. Mereka tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan (Hastuti, 2005). Kerja konkret mereka begitu diremehkan di dalam dokumentasi statistik. Meskipun kaum perempuan tampil mayoritas dalam produksi pertanian, namun sumbangan besar mereka ini tetap dianggap sepi.. Dijelaskan juga oleh Hastuti (2005) bahwa banyak perempuan yang bekerja pada pekerjaan –pekerjaan marginal sebagai buruh lepas, atau pekerja keluarga tanpa memperoleh upah atau dengan upah rendah. Mereka tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan. Hal ini karena pengakuan kontribusi kerja konkret mereka tidak pernah ada, kerja mereka dipandang sekedar sampingan atau merupakan bagian dari tenaga kerja keluarga yang tidak pernah diupah alias buruh tanpa upah.

Pada umumnya misi/harapan yang ingin dicapai oleh rata-rata tenaga kerja perempuan di pedesaan adalah alasan ekonomi yaitu menambah pendapatan keluarga. Sedangkan Novari, dkk (1991) menyebutkan bahwa wanita bekerja tentu bukan semata-mata karena alasan faktor ekonomi keluarga yang sedemikian sulit, tetapi juga beberapa motivasi lain, seperti suami tidak bekerja/pendapatan kurang, ingin mencari uang sendiri, mengisi waktu luang, mencari pengalaman, ingin berperan serta dalam ekonomi keluarga dan adanya keinginan mengaktualisasikan diri.

Meningkatnya partisipasi wanita dalam pasar kerja bukanlah terjadi secara kebetulan, karena peranan wanita dalam pasar tenaga kerja secara tradisional sebenarnya cukup besar, terutama di daerah pedesaan dan khususnya sektor pertanian. Peningkatan presentase wanita kerja disebabkan oleh dua faktor utama,

yaitu peningkatan dari sisi penawaran dan sisi permintaan (Tjiptoherijanto, 1997). *Pertama*, dari sisi penawaran peningkatan tersebut disebabkan antara lain oleh semakin meningkatnya tingkat pendidikan wanita dan disertai pula dengan menurunnya angka kelahiran. Hal tersebut didorong pula oleh kondisi makin besarnya penerimaan sosial wanita yang bekerja di luar rumah. *Kedua*, dari sisi permintaan, perkembangan perekonomian (dari sisi produksi) memerlukan tenaga kerja wanita, seperti halnya industri tekstil dan garmen. Sedangkan fenomena lain yang makin mendorong masuknya wanita ke lapangan kerja adalah karena makin tingginya biaya hidup bila hanya ditopang oleh satu penyangga pendapat keluarga. Fenomena ini mulai muncul ke permukaan dan terlihat jelas terutama pada keluarga yang berada di daerah perkotaan.

Kecenderungan untuk bekerja di luar rumah jelas akan membawa konsekuensi sekaligus berbagai implikasi sosial, antara lain meningkatnya kenakalan remaja akibat kurangnya perhatian orang tua, makin longgarnya nilai-nilai ikatan perkawinan / keluarga. Hal ini lebih sering diasosiasikan sebagai akibat dari semakin banyaknya ibu rumah tangga bekerja di luar rumah, terutama di perkotaan. Permasalahan akan menjadi makin rumit, bila ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah dalam jangka waktu yang relatif lama. Dengan kata lain ibu rumah tangga harus tinggal di kota lain dan berpisah dengan keluarganya dalam kurun waktu lama, yang artinya intensitas pertemuan dengan keluarga menjadi jauh berkurang dan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dalam sistem sosial budaya di Indonesia, peran dan tanggung jawab bagi kelancaran dan keselamatan rumah tangga ada di tangan wanita, sedangkan peran ayah atau bapak lebih dikaitkan sebagai penghasil dan penyangga pendapatan rumah tangga.

Dilihat dari segi sosial, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, terutama untuk kaum wanitanya, sangat sering mendapatkan kritik akibat banyaknya kasus yang muncul. Akhir-akhir ini terjadi kecenderungan feminisasi pekerja migran. Mereka bekerja di sektor-sektor yang dikategorikan sebagai “pekerjaan khas perempuan” seperti pembantu rumah tangga, pengasuh anak, dan sebagainya. Seringkali mereka menghadapi masalah karena keberadaannya sebagai perempuan, seperti pelecehan seksual, perkawinan semu, bahkan sampai kematian yang tidak jelas sebabnya. Kompleksitas dampak sosial dari migrasi pekerja wanita ke luar negeri juga semakin besar dengan hadirnya permasalahan lain seperti retaknya mahligai rumah tangga, penyelewengan suami dan lain-lain. Berbagai permasalahan yang dialami perempuan pekerja migran di negara lain lebih banyak diekspos media massa, lebih sering dari pada perempuan pekerja migran yang bekerja di dalam negeri. Namun bukan tidak mungkin bahwa persoalan serupa dialami pula perempuan pekerja migran di kota –kota besar di Indonesia.

Tidak sedikit perempuan masa kini, yang berhasil menjadi orang nomor satu di perusahaan maupun di instansi pemerintah. Sayangnya, seiring dengan keberhasilan perempuan menduduki peran-peran publik di masyarakat, ratusan juta anak terpaksa harus mengurangi jadwal asuhannya dari sang orang tua. Seharusnya masa kecil seorang anak ingin didekap ibunya, tapi mereka terpaksa harus menikmati kasih sayang dari seorang pembantu, atau pengasuh yang belum tentu 100 persen tulus mengasihinya dan tanpa disadari terkadang ibu langsung menyerahkan pengurusan anaknya kepada pengasuh. Meski pada malam hari ia berada di rumah. Dengan alasan capek, anaknya diserahkan kepada pengasuh. Bagaimana perasaan sang anak ketika tahu tentang ibunya menolak untuk mengganti popok atau memberinya air susu? Tentu sangat menyakitkan.

Hal yang tidak mustahil banyak dialami ibu-ibu bekerja. Seperti pernah diceritakan oleh kerabat penulis yang tinggal di Jakarta, kalau ia harus menyerahkan pengasuhan anaknya kepada *baby sitter*, ia cukup mendekati anak-anaknya ketika punya waktu luang. Entah ada libur panjang, atau ketika ia tidak capek. Itupun tidak setiap minggu. Fenomena peran ganda tidak hanya dialami oleh kalangan ekonomi menengah ke atas yang punya gaji besar dan bisa menggaji pembantu atau pengasuh. Namun juga pekerja perempuan menengah ke bawah bahkan bagi kalangan ini lebih menyulitkan. Disatu sisi mereka harus menyisihkan waktu untuk bekerja, di sisi lain mereka tak punya biaya untuk menggaji pengasuh.

C. Peran Ganda Perempuan Dalam Konteks Kesenjangan Gender: Refleksi Filosofis

Perbedaan gender dalam pandangan kaum feminis sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur yang di dalamnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender menurut Mansour Fakih termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam putusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif dan sebagainya (Fakih, 1996:12-13). Feminisme kemudian mengangkat tema peran ganda perempuan sebagai upaya untuk menyelesaikan ketidakadilan yang dirasakan perempuan. Meskipun harus diperhatikan bahwa feminisme bukan merupakan aliran yang monolitik, namun sebagian besar masih beranjak dari pemilahan antara wilayah publik dan domestik yang melahirkan konsep peran ganda. Marilyn French melihat bahwa upaya feminisme dalam menyorot masalah keperempuanan bukannya tidak meninggalkan masalah. Hal ini terungkap dalam tulisannya sebagai berikut. *The philosophy that can offer us a new way of seeing is feminism but if feminism offers a new set of ends, human goals, new (or rather, old) ideals of humanity, it does not yet possess a clear set of means which those ends can be attained* (French, 1985: 23).

Teori-teori feminis muncul secara khusus menyoroti kedudukan perempuan. Teori-teori ini berupaya untuk menggugat kemapanan patriarki dan berbagai bentuk stereotip gender lainnya yang berkembang luas di dalam masyarakat (Umar, 1999: 64). Secara umum feminisme dapat dikelompokkan atas feminisme liberal, feminisme sosialis-marxis, feminisme radikal, dan ekofeminisme. Teori-teori feminisme bukan merupakan kategori yang monolitik, meskipun dari berbagai corak yang ada, terdapat kesamaan umum bahwa semua teori ini anti dengan institusi patriarkat atau segala sesuatu yang berbau hirarkhis. Feminisme liberal merupakan aliran yang berusaha memasukkan ide bahwa perempuan merupakan makhluk yang sama dengan pria, dan mempunyai hak yang sama pula dengan pria. Feminisme liberal memberikan landasan teoritis akan kesamaan dalam hal potensi rasionalitasnya. Namun berhubung perempuan ditempatkan pada posisi bergantung pada laki-laki (suami) dan kiprahnya ditentukan dalam sektor domestik, maka yang lebih dominan tumbuh pada perempuan adalah aspek emosional daripada rasional. Bila perempuan tidak bergantung pada suami dan tidak berkiprah di sektor domestik, maka ia akan menjadi makhluk rasional seperti laki-laki (Megawangi, 1999: 118-119). Dalam beberapa hal terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, aliran ini masih tetap memandang perlu adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan. Kelompok ini termasuk paling moderat di antara kelompok feminis (Umar, 1999: 64-65).

Feminisme sosialis berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya. Kelompok ini menganggap posisi inferior perempuan berkaitan dengan struktur kelas dan keluarga dalam masyarakat kapitalis. Feminis sosialis mengadopsi teori praxis Marxisme yaitu teori kesadaran pada kelompok tertindas. Perempuan diharapkan sadar bahwa mereka merupakan “kelas” yang tidak diuntungkan. Proses kesadaran ini adalah usaha untuk membangkitkan rasa emosi (emotional arousal) pada para perempuan agar mereka bangkit untuk mengubah keadaannya. Semakin tinggi tingkat konflik antara kelas perempuan dan kelas laki-laki — sebagai kelas dominan — diharapkan akan dapat meruntuhkan sistem patriarkat (Megawangi, 1999: 133-134).

Teori feminisme radikal berpandangan bahwa ketidakadilan gender bersumber dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis ini terkait dengan peran kehamilan dan peran keibuan yang selaludiperankan oleh perempuan. Semua itu termanifestasi dalam institusi keluarga, karena itu feminisme radikal menganggap institusi keluarga sebagai institusi yang melahirkan dominasi laki-laki (patriarkat). Antipati terhadap makhluk pria membuat mereka memisahkan diri dari budaya maskulin dan membentuk budaya kelompoknya sendiri yang disebut sisterhood. Perempuan Supartiningih, Peran Ganda Perempuan diajak untuk mandiri bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan mereka (Megawangi, 1999: 178-179).

Eko-feminisme adalah teori yang timbul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan pada gerakan feminis liberal dan sosialis/marxis (Megawangi, 1999: 182-183). Teori feminisme modern berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Sementara teori eko-feminis melihat individu secara komprehensif yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Terlihat disini ada pergeseran paradigma sosial konflik menuju paradigma struktural fungsional yang memberikan tempat bagi adanya saling ketergantungan antarindividu dalam sebuah sistem (Megawangi, 1999: 188-191). Eko-feminisme ingin mengembalikan identitas perempuan dengan alam. Ini merupakan usaha untuk membebaskan perempuan dari perangkat sistem maskulin yang membuat perempuan menjadi bimbang akan perannya. Sistem maskulin telah merusak dan menutupi nilai sakral kualitas feminin yang merupakan fitrah perempuan.

Kembali pada pokok bahasan, secara umum peran ganda perempuan diartikan sebagai dua atau lebih peran yang harus dimainkan oleh seorang perempuan dalam waktu bersamaan. Adapun peran-peran tersebut umumnya mengenai peran domestik, sebagai ibu rumah tangga, dan peran publik yang umumnya dalam pasar tenaga kerja (Rustiani, 1996: 60). Konsep ini agaknya dapat menyelesaikan permasalahan pembakuan peran seperti yang selama ini dipahami sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang tidak dapat ditawar. Dengan konsep peran ganda seperti ini, perempuan tidak lagi melulu harus berkuat disektor domestik tetapi juga dapat merambah sektor publik. Pada kenyataannya, data statistik di seluruh dunia memang selalu menunjukkan bahwa angka partisipasi perempuan dalam pasar kerja dan politik selalu lebih kecil dari laki-laki.

Data statistik ini dipakai untuk menunjukkan bahwa ada kesenjangan struktural antara laki-laki dan perempuan yang dalam hal ini kaum perempuan selalu berada dalam kondisi keterpurukan. Data statistik memang dapat memberikan sebuah visualisasi tentang keadaan perempuan sehingga dengan mudah dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Akan tetapi, dengan hanya mengandalkan data statistik semata-mata, tanpa mengkaji konteks di balik data statistik tersebut, maka informasi yang berharga untuk menganalisis kondisi perempuan akan hilang. Bila informasi yang demikian ini terlewatkan, maka hal itu justru dapat menghambat usaha untuk menciptakan keadilan gender itu sendiri. UNDP, misalnya, mengidealkan kesetaraan gender adalah kesetaraan 50 berbanding 50 (fifty-fifty), yang notabene sangat kuantitatif. Asumsi yang dipakai pada konsep kesetaraan ini mengindikasikan bahwa laki-laki dan perempuan harus mempunyai kapasitas, kesukaan dan kebutuhan yang sama, sehingga idealnya mereka harus meraih tingkat kesehatan, pendidikan, pendapatan, partisipasi politik yang sama pula. Secara implisit di sini tidak diakui adanya perbedaan biologis yang mempengaruhi potensi kemampuan antara laki-laki dan perempuan. Padahal kalau ditilik secara cermat kemampuan manusia bisa dipandang dalam sifatnya yang universal dan spesifik. Kemampuan universal adalah kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dalam kapasitas dan potensinya yang sama. Karena itu pada kemampuan yang bersifat universal ini, konsep kesetaraan 50-50 ini sangat mungkin untuk dicapai. Sedangkan kemampuan spesifik adalah kemampuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan karena femininnya, misalnya, menjadikan hal tersebut sebagai faktor yang mempengaruhi dalam proses pemilihannya untuk terjun dalam kegiatan publik. Dengan adanya keragaman biologis ini menyebabkan kesetaraan 50-50 tidak tepat, karena sarana untuk mencapai itu tidak sama antara laki-laki dan perempuan (Megawangi, 1999: 29-30).

Konsep peran ganda perempuan pada dasarnya jika dirunut bersumber dari satu paradigma yang sama yaitu adanya perbedaan yang dikotomis antara ruang domestik dan publik. Konsep peran ganda yang semula diharapkan dapat memberdayakan perempuan dalam perjalanannya justru seringkali menimbulkan banyak kebingungan. Ini terjadi karena paradigma yang dipakainya masih belum bisa melepaskan diri dari corak berpikir dikotomis. Ruang publik dan domestik dipisahkan secara diametral. Jika pada akhirnya keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor dipilah-pilah dengan kategori peran ganda maka tidak mustahil hal ini akan melahirkan mentalitas dikotomis. Pemilah-milahan seperti ini akan melahirkan kepribadian terpecah (*split personality*) dan tentu akan menjadi masalah besar.

Perempuan seharusnya dibiarkan menjadi dirinya sendiri di mana pun ia berada, tanpa harus terkotak-kotak pada ruang publik atau domestik. Pemilahan secara dikotomis justru sangat kontraproduktif terhadap kemandirian perempuan itu sendiri.

Perempuan boleh memiliki banyak peran (multi peran) selama ia punya komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Keterpurukan pada dikotomi semacam ini dapat diatasi bila paradigma yang digunakan diubah dengan cara pandang pada sisi kemanusiaan yang bersifat universal. Salah seorang tokoh feminis, Naomi Wolf, mengatakan bahwa upaya untuk memperbaiki kehidupan perempuan membutuhkan keberanian untuk secara terus-menerus mensosialisasikan gagasan feminis secara rasional dan simpatik. “Menjadi feminis” bagi Wolf harus diartikan “menjadi manusia”, karena feminis adalah sebuah konsep yang mengisahkan harga diri pribadi dan harga diri seluruh kaum perempuan (Wolf, 1997: x). Laki-laki dan perempuan tidak dilihat semata-mata pada kelaki-lakiannya dan keperempuannya, tetapi dilihat secara umum sebagai manusia. Keduanya merupakan agen keadilan dan kebenaran serta mempunyai peluang yang sama dalam membangun peradaban. Konsep yang bersandar pada paradigma semacam ini lebih memfokuskan perbincangan pada pemahaman yang komprehensif dan integral terhadap wilayah-wilayah peran itu sendiri. Jika perempuan mengkonsentrasikan diri dalam peran domestik, tidak berarti ia harus meninggalkan peran publiknya, demikian juga sebaliknya.

Konsep peran komprehensif universal tidak hanya berlaku bagi perempuan tapi juga laki-laki. Dengan demikian peran keduanya bisa produktif dan bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena yang dibidik di sini adalah sisi kemanusiaannya yang universal, maka titik berangkatnya mau tidak mau harus berangkat dari kodrat kemanusiaan. Segala sesuatu diciptakan Tuhan dengan kodrat. Kodrat diartikan sebagai ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Tuhan bagi segala sesuatu. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin tentu memiliki kodrat masing-masing. Tetapi dari tabiat kemanusiaan secara umum tidak ada perbedaan. Laki-laki dan perempuan dari sisi kemanusiaan mengemban kewajiban kodrati yang sama, yakni sebagai hamba Tuhan dan khalifah di muka bumi. Dengan bersandar pada asumsi dasar bahwa Tuhan menciptakan sesuatu dengan berpasang-pasangan, maka keberadaan laki-laki dan perempuan dengan segenap potensinya diharapkan dapat berkoeksistensi secara sinergis mewujudkan tugas mulia yang diembannya. Keberadaan laki-laki dan perempuan bukan dipahami sebagai sesuatu yang dipertentangkan (dikotomis) tetapi sebagai hal yang berpasangan.

Konsep “paritas” (keberpasangan) diharapkan dapat kecenderungan wacana tidak hanya berkutat pada “kesumpekan” gender yang dikotomis. Keberpasangan dapat diibaratkan burung dengan sepasang sayapnya. Sayap kiri burung tidak lebih rendah dan atau lebih buruk dari sayap kanan burung. Jika tidak demikian maka si burung tetap tidak dapat terbang dengan sempurna. Sayap kiri adalah kekuatan lain yang harus disadari oleh sayap kanan. Ia harus diterima dan dijadikan sebagai pasangan dengan sadar dan diharmonisasi gerakannya. Namun keberpasangan tidak harus mengandung makna seperti sayap-sayap burung tersebut. Keberpasangan dapat pula dianalogikan dengan kunci. Kunci adalah kesatuan antara anak kunci dan lubang kunci. Sebuah anak kunci tentu hanya akan benar-benar fungsional untuk membuka atau menutup sesuatu jika ia dimasukkan pada lubang yang memang ditetapkan untuk dimasukinya. Anak kunci bisa saja masuk pada lubang-lubang kunci lain yang bukan pasangannya, tapi ia hanya bisa masuk dan tidak dapat diputar. Pintu terkunci pun bisa saja dibuka tanpa kunci dengan cara dibongkar atau didobrak (Risang Ayu, 1999: 63-64). Bentuk kunci tentu jelas berbeda dengan lubang kunci. Fungsionalisasinya pun tidak seperti sayap yang serempak, tapi justru lubang kunci yang kelihatannya diam dan submisif yang mengaktifkan kunci. Karena itu cara kerja kunci adalah dinamika keharmonisan yang lebih tidak kasat mata jika dibandingkan dengan dinamika keharmonisan sayap burung.

Keberpasangan laki-laki dan perempuan sering mengalami penyederhanaan hanya sebagai keberpasangan sayap burung, padahal tidak selalu demikian. Sering terjadi keberpasangan kunci yang lebih cocok. Dari kompleksitas keberpasangan laki-laki dan perempuan tersebut, ada satu hal yang jelas bahwa kelemahan selalu mengandaikan kelebihan dalam segi lain. Seandainya memang kelemahan perempuan

yang sebenar-benarnya masih ada, maka tentu itu bukan kelemahan dari segi kualitas fisik (Risang Ayu, 1999:65). Hebatnya laki-laki yang sanggup bekerja fisik terus-menerus tanpa terhalang oleh menstruasi tentu tidak dapat dibandingkan dengan hebatnya perjuangan perempuan dalam melahirkan anak.

Dalam banyak bidang pekerjaan, mekanisasi telah membuat pekerjaan otot berganti menjadi pekerjaan memencet tombol saja. Ini jelas menetralkan kelemahan fisik perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah sebanding, sejajar tapi tidak sama. Laki-laki dan perempuan adalah diri yang satu yang menempati dua raga yang Supartiningih, Peran Ganda Perempuan⁵³ berbeda. Perbedaan ini jika dihayati secara jeli akan bermuara pada pengalaman kerinduan akan keutuhan. Pengalaman kerinduan ini sama proporsinya antara laki-laki dan perempuan. Kerinduan akan keutuhan yang horisontal ini penting dalam kacamata spiritual. Hanya melalui Tuhan, manusia baik laki-laki atau pun perempuan dapat memahami kerinduan akan keutuhan yang lebih besar, yaitu kerinduan transenden. Kerinduan untuk selalu bersama-sama dan selalu utuh dengan Yang Mutlak (Risang Ayu, 1999: 25). Keyakinan dan upaya untuk merealisasikan bahwa laki-laki dan perempuan adalah satu diri merupakan suapembebasan paling radikal yang dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan sebagai seorang manusia. Keyakinan ini dapat membebaskan laki-laki dan perempuan dari penjara raganya yang sementara, dikotomi menjadi kesatuan yang utuh, pasangan manusia. Dari interaksi saling mengutuhkan dan mengimani kembali antar pasangan manusia maka kemampuan bertanggungjawab, kedewasaan bersikap, dan ketenangan akan dapat tercapai (Risang Ayu, 1999: 57). Bila ini ditarik pada konteks gerakan-gerakan yang peduli kaum perempuan maka akan tampak benang merahnya. Ide dasar gerakan tersebut tentu sangat luhur, yakni untuk memanusiakan perempuan. Perempuan adalah juga manusia, sama dengan laki-laki. Keduanya sama-sama dititipi ruh, memiliki potensi untuk cenderung ke arah kebaikan dan sebaliknya, berpotensi untuk mencapai ketinggian ilmu dan sebaliknya, dan berpotensi untuk mencapai kemuliaan tertinggi. Karena itu, dalam konteks memanusiakan perempuan, perempuan harus diakui sebagai subjek yang punya kehendak, kebaikan, dan kebijakan dari dalam dirinya sendiri.

PENUTUP

Perbincangan seputar wacana keperempuanan yang kebanyakan berkuat pada asumsi pemilahan secara dikotomis wilayah domestik dan publik ternyata banyak menyimpan kerancuan. Ini terjadi tidak hanya pada persepsi tradisional tentang pembagian kerja seksual, tetapi juga pada persepsi peran ganda perempuan. Itu semua terjadi karena wilayah domestik dan publik dipandang sebagai dua sisi yang terpisah secara diametral. Padahal, jika ia dipandang sebagai dua titik yang berhubungan pada garis kontinum, tentu dikotomi seperti itu tidak akan muncul. Antara domestik dan publik adalah ibarat antara rumah dan dunia. Rumah adalah juga bagian dari dunia. Laki-laki dan perempuan tidak mungkin menemukan makna kehadirannya di dunia sebelum ia menemukan makna kehadirannya di rumah. Rumah dan dunia bukanlah dua nama dari dua jenis ruang. Yang terpenting bagi laki-laki maupun perempuan bukanlah untuk mengetahui di mana ia harus paling banyak menghabiskan waktu dan konsentrasinya. Akan tetapi justru sejauhmana keduanya mempunyai pengabdian yang tinggi bagi rumah dan seisinya dan selanjutnya memperluas pengabdian itu melampaui batas-batas fisik rumahnya, pengabdian yang mendunia. Keduanya harus memiliki keterikatan yang tidak dapat diingkari dengan rumahnya di satu pihak dan juga memiliki kesadaran yang menyemesta di lain pihak. Perempuan dan laki-laki bukanlah dua makhluk yang berbeda sama sekali, tetapi juga tidak benar-benar sama. Perempuan dan laki-laki adalah diri yang satu \meski menempati dua raga yang berbeda. Mereka bukan “lawan jenis” tapi “pasangan jenis”. Mereka dicipta bukan untuk saling menindas dan menguasai tetapi saling mengutuhkan dan mengimani sehingga tercapai kemampuan bertanggungjawab, kedewasaan bersikap dan ketenangan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, 2003, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Astiti, Ni Wayan Sri, 2006, *Profil Rumah Tangga Migran Perempuan dan Anak di kabupaten Buleleng*, Soca vol 6 Pebruari 2006
-*Analisis Sosial: Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan*, Edisi 4/November 1996, Yayasan Akatiga, Bandung
- Fakih, M., 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- French, M., 1985, *Beyond Power on Women, Men and Morals*, Ballantine Books, New York
- Lindsey, L.L., 1990, *Gender Roles: A Sociological Perspective*, Prentice Hall, New Jersey
- Lips, H.M., 1993, *Sex and Gender: An Introduction*, Mayfield Publishing Company, London
- Megawangi, R., 1999, *Membiarkan Berbeda? : Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Mizan, Bandung
- Neufeldt, V., (ed), 1984, *Webster's New World Dictionary*, Webster's New world Cleveland, New York
- Risang Ayu, M., 1999, *Cahaya Rumah Kita*, Mizan, Bandung
- Rustiani, F., 1996, "Istilah-Istilah Umum dalam Wacana Gender", dalam *Jurnal Showalter*, E., (ed), 1989, *Speaking of Gender*, Routledge, New York & London.
- Tierney, H., (ed), tanpa tahun, *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. I, Green Wood Press, New York
- Sinungan, Muchdarsyah, 2000. *Produktivitas tenaga kerja Perempuan*, Penerbit Bumi Alksara.
- Umar, N., 1999, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al Qur'an*, Paramadina, Jakarta.
- Wilson, H.T., 1989, *Sex and Gender: making Cultural Sense of Civilization*, E.J. Brill, Leiden, New York, Kobenhavn, Koln.
- Wolf, N., 1997, *Gegar Gender*, Pustaka Semesta Press, Yogyakarta.